

SiALAM: Mendorong Percepatan Akses Perhutanan Sosial untuk Masyarakat Melalui Sistem Informasi

Penulis: Harry Aksomo, Azwar Najib Alhafi, Fajar Assidiq, Alfa Nugraha, Yumna Karimah, Yusi Septriandi, Feri Johana, Andree Ekadinata

Perhutanan Sosial Sebagai Skema Akses Legal pemanfaatan Lahan untuk masyarakat disekitar hutan

Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial memberikan akses legal Pemanfaatan Hutan yang dilakukan oleh kelompok Perhutanan Sosial

Model pendekatan mutakhir dalam pengelolaan hutan yang mampu mengatasi sejumlah persoalan, seperti kemiskinan,

perbaikan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan, serta persoalan terkait dinamika sosial budaya lainnya

Permen LHK No.9 Tahun 2021

Program Perhutanan Sosial adalah bagian dari solusi

untuk mengatasi masalah tenurial dan memberikan lebih banyak akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan dan mengurangi kemiskinan.

Strategi jangka panjang rendah karbon dan ketahanan iklim (LTS-LCCR, 2021)

Latar Belakang

Sistem Informasi Akses Lahan Mendukung Percepatan Perhutanan Sosial adalah kerangka kerja sistem informasi yang dibangun untuk

mendukung diseminasi pengetahuan dan informasi yang akan meningkatkan kapasitas petani dan/atau masyarakat dalam

mengelola bentang lahannya melalui kemudahan akses informasi perhutanan sosial.

Kerangka kerja ini dibangun dengan mempertimbangkan:

- 1 Terbangunnya Platform Sistem Informasi yang tepat guna
- 2 Tersusunnya Protokol dan guidelines
- 3 Penguatan dan Keterlibatan para pihak

Implementasi Perhutanan Sosial masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan



1 Kapasitas dan informasi Masyarakat yang masih terbatas dalam memulai aktivitas perhutanan sosial dan mengakses informasi yang dibutuhkan untuk mengajukan perijinan Perhutanan Sosial.



2 Partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan dan lahan serta mengintegrasikannya dalam perencanaan



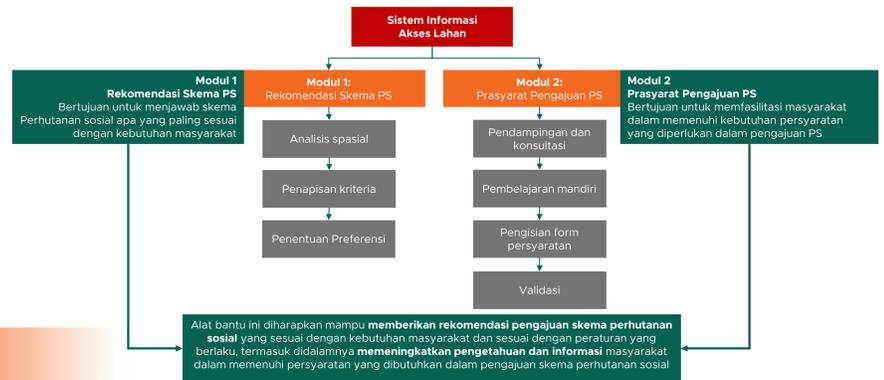
3 Kelompok masyarakat yang saat ini telah memiliki ijin perhutanan sosial juga masih membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kegiatan usaha perhutanan sosial.



4 Keterbatasan sumberdaya pendamping memerlukan investasi, SDM, dan infrastruktur yang memadai guna melakukan pendampingan kepada penerima ijin.

Berbagai keterbatasan ini mempengaruhi percepatan implementasi perhutanan sosial. Ketersediaan teknologi informasi sangat potensial untuk membantu pemecahan permasalahan ini, sekaligus mengatasi tantangan dan hambatan yang ada.

Kerangka kerja sistem informasi yang dibangun untuk mendukung diseminasi pengetahuan dan informasi yang akan meningkatkan kapasitas petani dan/atau masyarakat sekitar hutan dalam mengelola bentang lahan melalui kemudahan akses informasi perhutanan sosial



Modul 1: Rekomendasi Skema PS

Analisis spasial

Membantu menganalisis variable penentu rekomendasi skema PS yang mudah ditunjukkan secara keruangan

Menyajikan Ringkasan area indikatif potensial rekomendasi pengajuan skema PS yang sesuai pada suatu lokasi

Penapisan kriteria

Membantu analisis variable penentu rekomendasi skema berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku terkait pemilihan skema PS

Penelaahan regulasi dan peraturan perundangan

Identifikasi kriteria setiap skema PS berdasarkan regulasi

Analisis kombinasi kriteria yang mewakili setiap skema PS

Penapisan setiap skema PS yang memenuhi kriteria pada suatu kondisi menggunakan daftar pertanyaan yang disajikan dalam kuisioner

Penentuan Preferensi

Membantu melakukan penilaian kecenderungan untuk memilih skema PS yang lebih disukai pengguna berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan berdasarkan kondisi eksisting

Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk membantu menentukan pengambilan keputusan dengan lebih mudah terhadap berbagai pilihan terkait skema akses legal pemanfaatan lahan melalui program perhutanan sosial dan menentukan salah satu yang paling sesuai

Modul 2: Prasyarat Pengajuan PS

Membantu menganalisis variable penentu rekomendasi skema PS yang mudah ditunjukkan secara keruangan

Menyajikan Ringkasan area indikatif potensial rekomendasi pengajuan skema PS yang sesuai pada suatu lokasi

Pendampingan dan konsultasi

Mendukung penyiapan dokumen persyaratan pengajuan skema PS

Memfasilitasi diskusi dan konsultasi antara Masyarakat hutan calon pengaju PS dengan para pihak

Pengisian form persyaratan

Memfasilitasi diskusi dua arah antara calon pengusul dan instansi yang berwenang dalam menilai persyaratan awal yang telah disiapkan

Training of Trainer SiAlam kepada Pemangku Kepentingan



<https://ps.lahanuntukkehidupan.id/>



Workshop bersama representasi kelompok masyarakat



Melibatkan 221 peserta (48% Perempuan) dari berbagai pemangku kepentingan DLHK Provinsi, KPH, Pokja PPS, Akademisi, Mitra Pembangunan.



Melibatkan 174 peserta (30% Perempuan) yang merupakan representatif kelompok Masyarakat



Peningkatan Pengetahuan:

SiAlam berupaya mendukung proses **diseminasi informasi dan pengetahuan** untuk Masyarakat calon pengaju PS dalam memenuhi persyaratan permohonan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial



Kemudahan akses informasi:

SiAlam memungkinkan **komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemangku kebijakan**. Masyarakat dapat mengajukan pertanyaan atau meminta klarifikasi tentang persyaratan yang kurang jelas. Dengan demikian, masyarakat mendapat penjelasan yang akurat dan mengurangi kesalahpahaman dalam melengkapi dokumen persyaratan.



Pendampingan virtual:

SiAlam sebagai alternatif sarana untuk mendukung para pihak dalam melakukan pendampingan secara virtual kepada penerima ijin melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pengajuan skema perhutanan sosial